

SKPD : **IV. Inspektorat Kota Cimahi**

- MISI : 1. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Kota Cimahi yang baik, transparan dan akuntabel  
 2. Pengembangan integritas, profesionalisme dan kompetensi Aparatur Pengawasan Inspektorat Kota Cimahi.  
 3. Mendorong dukungan administratif terhadap peran pengendalian intern Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi.	Cakupan reviu laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)		Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK RI	jumlah realisasi dokumen pelaporan SKPD yang direviu dibagi jumlah rencana dikali 100%
2		Jumlah SKPD dengan nilai hasil evaluasi laporan keuangan kategori baik			Jumlah SKPD dengan nilai hasil evaluasi laporan keuangan kategori baik
3		Cakupan reviu laporan kinerja SKPD			jumlah realisasi dokumen pelaporan SKPD yang direviu dibagi jumlah rencana dikali 100%
4		Jumlah SKPD dengan nilai hasil evaluasi laporan kinerja kategori baik		Hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah SKPD dengan nilai hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja minimal 60%
5	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan	Capaian kinerja hasil reviu laporan keuangan terhadap revisi dokumen pelaporan			jumlah point revisi yang dilakukan dibagi jumlah total point revisi yang harus dilakukan dikali 100%
6		Capaian kinerja hasil reviu laporan kinerja terhadap revisi dokumen pelaporan			jumlah point revisi yang dilakukan dibagi jumlah total point revisi yang harus dilakukan dikali 100%
7	Mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih;	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus / khusus		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan KaSus/Khusus	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus / khusus
8		Jumlah pengaduan kasus / khusus dari masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus	Jumlah pengaduan kasus / khusus dari masyarakat

**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan  
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**